

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pokok yang umumnya dihadapi oleh setiap Negara, baik di Negara maju sehingga terdapat Negara tertinggal dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi biasanya ditandai dengan meningkatnya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat sehingga meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini, artinya terjadi peningkatan pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dilihat melalui pertambahan jumlah barang yang diproduksi, tetapi juga melalui perkembangan infrastruktur, jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, dan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. (Fitrayati, 2013)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2007), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Dengan berjalannya waktu dalam kehidupan tidak pernah lepas dari kesejahteraan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok, kesejahteraan itu dapat dinikmati oleh masyarakat apabila kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, seperti perekonomian, kesehatan dan kebebasan. Perekonomian ini telah menjadi fenomena penting yang harus diperhatikan dan ditangani secara serius, karena akibat dari tidak sempurna atau tidak terpenuhinya ekonomi masyarakat di seluruh muka bumi, khususnya di Pulau Madura, dapat mengakibatkan tidak sejahteranya kehidupan yang biasa disebut kemiskinan.

Kemiskinan di suatu Negara atau wilayah sudah menjadi tanggung jawab pemerintahnya di wilayah atau daerah tersebut, dengan kata lain pemerintah harus bisa memberikan fasilitas atau lapangan pekerjaan yang bisa membuat masyarakat beraktifitas untuk menghasilkan pendapatan atau mengembangkan pertumbuhan perekonomiannya, agar bisa menikmati hidup yang bermakna.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan jumlah infrastruktur, sarana pendidikan, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat merupakan kunci dari penurunan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi menandakan bahwa pemerintah mampu memahami dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar angka kemiskinan dapat dikurangi. Pertumbuhan ekonomi sendiri tercermin dari perkembangan PDRB. PDRB adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang di hasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah di dalam suatu periode. (Sasana, 2006)

Semakin tinggi PDRB di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam pertumbuhan ekonomi semua Negara di dunia dewasa ini, pemerintah di Negara manapun bisa segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya

tingkat pertumbuhan ekonomi yang di capainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil atau gagalnya progam- progam di Negara-negara dunia ketiga sering di nilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional.(Todaro, 2000)

Disamping dipengaruhi oleh Laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari laju kenaikan PDRB, ada beberapa penyebab lain terjadinya kemiskinan di sebuah negara atau wilayah. Menurut *World Bank* (2004), salah satu penyebab kemiskinan ialah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lackof income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Kemiskinan sering diartikan sebagai perampasan kesejahteraan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, atau dengan kata lain tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat. (Siregar & Wahyuni, 2007)

Salah satu pulau yang ada di indonesia adalah pulau madura. Madura yang merupakan bagian daripada provinsi jawa timur memiliki 4 kabupaten/kota yang terdiri dari kabupaten Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Keempat kabupaten/kota yang terletak di pulau madura tersebut sampai saat ini masih menyumbangkan angka kemiskinan yang cukup tinggi, dimana keempat kabupaten/kota tersebut memiliki rata-rata jumlah penduduk miskin diatas rata-rata

jumlah penduduk miskin provinsi jawa timur. Adapaun jumlah dan rata-rata penduduk miskin tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Madura Tahun 2017-2019 (Ribuan Jiwa)

Kab/Kota	2019	2018	2017
Bangkalan	186,11	191,33	206,53
Sampang	202,21	204,82	225,13
Pamekasan	122,43	125,76	137,77
Sumenep	211,98	218,6	211,92
Rata-rata penduduk miskin JATIM	108,22	114,02	121,5

Sumber : BPS Provinsi JATIM

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, keempat kabupaten/kota yang terdapat di pulau madura mengalami penurunan penduduk miskin yang relatif signifikan dari tahun 2017-2019 kecuali kabuapten sumenep pada tahun 2018 mengalami peningkatan penduduk miskin dimana pada tahun 2017 berjumlah 211,92 dan pada tahun 2018 mencapai 218,6. Namun meskipun demikian terjadi penurunan lagi pada tahun 2019 menjadi 211,98.

Penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun merupakan sebuah prestasi bagi pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Namun yang menjadi permasalahan sampai saat ini khususnya di pulau madura yaitu, rata-rata jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di pulau madura sampai saat ini masih berada diatas rata-rata penduduk miskin di provinsi jawa timur. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 penduduk miskin kabupaten bangkalan berjumlah 186,11, kabupaten sampang berjumlah 202,21, kabupaten pamekasan berjumlah 122,43, dan kabupaten sumenep berjumlah 211,98. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019

pada 4 kabupaten/kota tersebut masih berada diatas rata-rata penduduk miskin di provinsi jawa timur yaitu sebesar 108,22 pada tahun 2019, tidak hanya itu apabila dilihat pada tabel diatas, dimana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan 2018 jumlah penduduk miskin di pulau madura juga berada diatas rata-rata penduduk miskin jawa timur. Selain itu, angka kemiskinan di 4 kabupaten kota di pulau madura dapat dilihat pada tabel persentase penduduk miskin di kabupaten/kota dibawah ini.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2018

Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Bangkalan	22,4	22,57	21,41	21,32	19,59
Kab. Sampang	25,8	25,69	24,11	23,56	21,21
Kab. Pamekasan	17,7	17,41	16,7	16	14,47
Kab. Sumenep	20,5	20,2	20,09	19,62	20,16
Persentase penduduk miskin Provinsi JATIM	12,28	12,34	12,05	11,77	10,98

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata terjadi penurunan persentase penduduk miskin di 4 kabupaten/kota di madura dari tahun 2014-2018, namun sama halnya dengan penurunan jumlah penduduk miskin di madura dimana penurunan tersebut angkanya masih berada diatas rata-rata jumlah penduduk miskin di provinsi jawa timur, begitu juga dengan persentase penduduk miskin diatas dimana nilainya masih berada diatas persentase penduduk miskin provinsi jawa timur. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di kabupaten bangkalan sebesar 19,59%, kabupaten sampang 21,21%, kabupaten pamekasan sebesar 14,47%, dan kabupaten sumenep sebesar 10,98%, sedangkan apabila dilihat dari persentase penduduk miskin di provinsi jawa timur hanya sebesar 10,98%. (BPS, 2018)

Seperti yang dibahas di atas bahwa meskipun persentase penduduk miskin 4 kab/kota yang ada di madura masih berada diatas persentase penduduk miskin provinsi jawa timur, namun yang menjadi salah satu prestasinya adalah dimana persentase penduduk miskin di madura rata-rata mengalami penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya. Selain itu, penurunan penduduk miskin di madura ternyata di ikuti dengan meningkatnya beberapa variabel ekonomi seperti produk domestik regional bruto (PDRB), rata-rata lama sekolah, dan terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka namun tidak signifikan.

Tabel 1.3 Rata-Rata Pertumbuhan PDRB, RLS, dan TPT tahun 2009-2018 di 4 Kabupaten/Kota Madura (%)

Kab/Kota	PDRB	RLS	TPT
Bangkalan	1,91	4,86	5,25
Sampang	4,23	3,54	2,62
Pamekasan	6,09	5,65	3,05
Sumenep	6,31	4,67	2,03

Sumber :BPS (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten bangkalan dari tahun 2009-2018 adalah 1,91%. Artinya setiap tahun terjadi peningkatan PDRB rata-rata sebesar 1,91% dimana hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu variabel yang dapat menekan angka kemiskinan di kabupaten bangkalan, selain itu kabupaten sampang, pamekasan ,dan sumenep juga mengalami pertumbuhan PDRB yang positif, dimana rata rata pertumbuhan PDRB kabupaten sampang setiap tahunnya dari tahun 2009-2018 adalah sebesar 4,23%, kabupaten pamekasan sebesar 6,09%, dan kabupaten sumenep sebesar 6,31.

Selain itu, rata-rata lama sekolah keempat kabupaten di madura juga mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah yang signifikan setiap tahunnya. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan persentase lama sekolah di kabupaten bangkalan yaitu sebesar 4,86%. Kabupaten sampang sebesar 3,54%, kabupaten pamekasan sebesar 5,65%, dan kabupaten sumenep sebesar 4,67%. selain itu rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten bangkalan adalah 5,25%, kabupaten sampang 2,62%, kabupaten pamekasan 3,05% dan yang terakhir kabupaten sumenep sebesar 2,03%.

Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang penting untuk meneliti beberapa variabel di atas dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan khususnya di 4 kabupaten/kota yang ada di pulau madura, sehingga di dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di 4 kabupaten/kota yang ada di madura dari tahun 2009-2018”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di empat Kabupaten di Madura?
2. Apakah tingkat rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di empat Kabupaten di Madura?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di 4 Kabupaten di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan PDRB, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di 4 Kabupaten di Madura Provinsi Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh terhadap beberapa variabel seperti pertumbuhan PDRB, tingkat rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam perannya terhadap penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di 4 kabupaten di Madura provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah khususnya pemerintah di Madura untuk menggali apa saja faktor yang dapat menjadi variabel dalam upaya menekan angka kemiskinan di Madura. Dan yang terakhir adalah sebagai acuan atau pondasi untuk penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin dengan menggali variabel-variabel baru yang dapat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.